

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan ekonomi mencakup proses dan kebijakan yang diterapkan negara untuk memperbaiki kondisi ekonomi, politik, dan kesejahteraan sosial warga negara/penduduknya<sup>1</sup>. Kesejahteraan sosial penduduk dapat dicapai melalui pertumbuhan ekonomi sekaligus adanya pemerataan dalam distribusi pendapatan masyarakat, dengan kebijakan dan program-program yang dijalankan, baik melalui kebijakan moneter maupun kebijakan fiskal.

Beberapa program dan kebijakan yang diterapkan ditujukan antara lain untuk pengendalian inflasi, peningkatan kesempatan kerja, dan pertumbuhan yang berkelanjutan, serta mengurangi kemiskinan dan ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Kebijakan dan program juga bertujuan untuk memberikan/menyediakan layanan kepada publik yang mencakup pembangunan jalan raya, pengelolaan taman, dan layanan medis bagi golongan kurang mampu, serta pembiayaan di bidang pendidikan. Sedang dalam perbaikan iklim usaha melalui upaya-upaya khusus, antara lain keuangan usaha, pemasaran, pembangunan kawasan hunian, retensi dan ekspansi usaha, alih teknologi, pengembangan properti dan lain sebagainya. Bila tujuan pembangunan hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, maka tidak seluruhnya menjadikan penduduk sejahtera, bahkan menimbulkan jurang kesejahteraan

---

<sup>1</sup> O'Sullivan & Sheffrin, *Economics: Principles in action*. (NY: Pearson Prentice Hall, 2003)

bagi masyarakat, atau timbulnya ketimpangan dalam distribusi pendapatan masyarakat.

Konsep ketimpangan distribusi pendapatan itu sendiri berbeda dengan konsep kemiskinan. Jika kemiskinan diukur melalui standar hidup yang absolut dengan kriteria tertentu, maka ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat cenderung melihat pendapatan dari standar hidup relatif dari seluruh masyarakat, yang dapat disebabkan oleh kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin. Tinggi-rendahnya ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat dapat dilihat secara agregat menggunakan Indeks Gini, secara wilayah menggunakan Indeks Williamson, dan secara sektoral bisa diukur dengan Indeks Theil.

Pembangunan ekonomi suatu negara dinyatakan berhasil jika terjadinya pertumbuhan ekonomi yang diiringi dengan berkurangnya ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pembagian pendapatan di negara-negara berkembang sejak tahun tujuh puluhan telah menjadi perhatian utama dalam menetapkan kebijaksanaan pembangunan. Perhatian ini didasarkan pada pertumbuhan ekonomi telah mengakibatkan semakin meningkatnya ketimpangan pembagian pendapatan dengan penelitiannya di beberapa negara.

Myrdal (M.L. Jhingan,)<sup>2</sup> berpendapat bahwa pembangunan ekonomi menghasilkan suatu proses sebab akibat sirkuler yang membuat si kaya mendapat keuntungan semakin banyak dan mereka yang tertinggal di belakang menjadi semakin terhambat. Dampak balik (*backwash effect*) cenderung

---

<sup>2</sup> M.L. Jhingan. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), p.268-275

membesar sedangkan dampak sebar (*spread effect*) cenderung mengecil. Secara kumulatif kecenderungan ini semakin memperburuk ketimpangan internasional dan menyebabkan ketimpangan regional diantara negara-negara terbelakang.

Ketidakmerataan regional dalam suatu negara berakar pada dasar nonekonomi. Ketimpangan ini berkaitan erat dengan sistem kapitalis yang dikendalikan oleh motif laba. Motif laba inilah yang mendorong berkembangnya pembangunan terpusat di wilayah-wilayah yang memiliki harapan laba tinggi sementara wilayah-wilayah lain tetap terlantar, hal ini menurut Myrdal dikarenakan oleh peranan bebas kekuatan pasar, yang cenderung memperlebar ketimbang mempersempit ketimpangan regional. Jika segala sesuatunya diserahkan pada kekuatan pasar tanpa diiringi oleh intervensi kebijakan apapun, maka produksi, industri, perdagangan, perbankan dan hampir semua kegiatan ekonomi yang di dalam suatu perekonomian sedang berkembang yang cenderung mendatangkan keuntungan akan mengelompok di daerah atau wilayah-wilayah tertentu dan meninggalkan daerah-daerah yang semakin terbelakang. Hal ini terbukti dari nilai indeks ketimpangan Williamson terhadap provinsi di Indonesia.

**Tabel I.1 Perkembangan Indeks Williamson di Indonesia  
Tahun 2010-2012**

No.	Provinsi	Tahun		
		2010	2011	2012
1	Nanggroe Aceh Darussalam	0,202	0,239	0,251
2	Sumatera Utara	0,331	0,344	0,355
3	Sumatera Barat	0,298	0,299	0,406
4	Riau	0,192	0,222	0,207
5	Jambi	0,757	0,842	0,85
6	Sumatera Selatan	0,675	0,765	0,874
7	Bengkulu	0,171	0,165	0,16
8	Lampung	0,147	0,152	0,16
9	Bangka Belitung	0,049	0,042	0,065
10	Kepulauan Riau	0,328	0,297	0,221
11	DKI Jakarta	0,536	0,59	0,631
12	Jawa Barat	0,738	0,79	0,813
13	Jawa Tengah	0,301	0,584	0,604
14	DI Yogyakarta	0,398	0,399	0,365
15	Jawa Timur	0,7	0,953	0,652
16	Banten	0,61	0,539	0,566
17	Bali	0,096	0,109	0,006
18	Nusa Tenggara Barat	0,254	0,256	0,26
19	Nusa Tenggara Timur	0,047	0,05	0,053
20	Kalimantan Barat	0,236	0,273	0,274
21	Kalimantan Tengah	0,301	0,279	0,339
22	Kalimantan Selatan	0,568	0,364	0,361
23	Kalimantan Timur	0,581	0,617	0,653
24	Sulawesi Utara	0,205	0,208	0,206
25	Sulawesi Tengah	0,132	0,149	0,167
26	Sulawesi Selatan	0,327	0,706	0,327
27	Sulawesi Tenggara	0	0	0
28	Gorontalo	0,213	0,217	0,22
29	Sulawesi Barat	0,335	0,345	0,291
30	Maluku	0,513	0,433	0,472
31	Maluku Utara	0,431	0,427	0,429
32	Papua	0,412	0,409	0,434
33	Papua Barat	0,214	0,208	0,174

Sumber : Badan Pusat Statistik (Data diolah)

Data diatas menunjukkan bahwa adanya fluktuasi kenaikan ketimpangan dari tahun ke tahun pada provinsi-provinsi besar seperti Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Banten, dan Sumatera Selatan. Terlihat pula dari seluruh provinsi rata-rata mengalami kenaikan ketimpangan yang disebabkan oleh berbagai faktor. Banyak penyebab terjadinya ketimpangan tersebut. Salah satu sebab terjadinya ketimpangan antara lain karena adanya alokasi sumber daya yang tidak merata, juga karena adanya kelangkaan akan sumber daya tersebut<sup>3</sup>. Sedangkan Heshmati<sup>4</sup> dalam penelitiannya telah mengidentifikasi beberapa penelitian tentang penyebab dari ketimpangan distribusi pendapatan.

Penyebab tersebut antara lain karena jumlah penduduk yang besar, biaya hidup tinggi, keterbukaan ekonomi (termasuk globalisasi), teknologi, spesialisasi produksi, pertumbuhan ekonomi, skill (yang berimbas pada teknologi dan upah), permintaan dan penawaran sumber daya dan kebijakan redistribusi.

Sumber daya yang langka tidak hanya sumber daya manusia saja (termasuk SDM yang *high-tech*) dan sumber daya alam (SDA), tapi juga sumber daya modal (SDCap). Sumber daya modal memegang peranan yang sangat penting, terutama untuk para pelaku usaha/industri kecil dan menengah (IKM). Sumber daya modal dapat mempengaruhi tingkat pencapaian tujuan produksi/pertumbuhan ekonomi seperti banyak dikemukakan dalam teori-teori

---

<sup>3</sup> Deininger, Klaus and Squier, Lyn. 1997. *Economic Growth and Income Inequality: Reexamining the links*. Finance & Development, March 1997, vol 34, No.1, p. 38-41

<sup>4</sup> Heshmati, Almas, 2006. *The World Distribution of Income and Income Inequality: A Review of the Economics Literature*, journal of world-systems research, XII, I, July 2006, 61-107

pertumbuhan ekonomi, dan sekaligus dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui kesempatan berusaha/berproduksi, sehingga pendapatan masyarakat akan meningkat. Jika pendapatan masyarakat meningkat, terutama bagi masyarakat golongan ekonomi menengah dan tidak mampu, maka diharapkan kesejahteraan masyarakat meningkat, sehingga diharapkan adanya pemerataan dalam pendapatan masyarakat. Oleh karena itu perlu keberpihakan pada golongan menengah dan tidak mampu, dengan memberi kesempatan pada kedua golongan masyarakat tersebut untuk memperoleh/mengakses sumber daya modal/finansial.

Keberpihakan pada masyarakat menengah dan tidak mampu memerlukan peran dari pemegang otoritas kebijakan dalam menyalurkan sumber daya modal/finansial tersebut. Selama ini kebijakan yang ditujukan untuk menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan lebih banyak yang dilakukan melalui kebijakan fiskal, termasuk kebijakan redistribusi melalui pembayaran transfer dan subsidi pada masyarakat tertentu. Namun akhir-akhir ini, peran kebijakan moneter sering dibicarakan pula guna mengatasi ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat. Pentingnya sumber daya finansial untuk menurunkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat banyak disarankan terutama pasca dunia dilanda krisis ekonomi pada 2008.

Coibion (2012)<sup>5</sup> yang meneliti bahwa tindakan kebijakan moneter yang selama ini dijalankan oleh perbankan Amerika Serikat secara sistematis telah ikut meningkatkan ketimpangan pada pendapatan pekerja, total pendapatan,

---

<sup>5</sup> Coibion, et all, 2012. *Innocent Bystanders? Monetary Policy and Inequality in US*. IMF Working Paper, Agustus 2012

konsumsi dan pengeluaran total. Atau dengan kata lain perbankan AS harus lebih tepat menerapkan kebijakan moneternya. Sedangkan pernyataan Coeure (2012)<sup>6</sup> dari Bank Sentral Eropa menyebutkan bahwa kebijakan moneter berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan ketimpangan pendapatan melalui berbagai saluran seperti tingkat bunga (*baik current* maupun *expected interest*), penyaluran kredit dan harga-harga asset. Di sini Coeure menawarkan solusi untuk mengatasi ketimpangan pendapatan di Eropa yang dilanda krisis melalui saluran kebijakan moneter, termasuk penyaluran kredit.

Sumber daya modal yang berwujud uang disebut sumber daya finansial. Sumber daya finansial merupakan uang yang tersedia untuk sebuah usaha yang digunakan untuk pengeluaran dalam bentuk uang tunai, surat berharga likuid dan jalur kredit. Sebelum masuk ke bisnis, pengusaha perlu mengamankan sumber daya keuangan yang memadai agar dapat beroperasi sesuai dengan tujuan perusahaan. Bagi pengusaha yang bergerak di Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) penyediaan sumber daya finansial sangat dibutuhkan, karena keterbatasan modal mereka. Oleh karena itu diperlukan adanya keberpihakan otoritas moneter untuk mengalokasikan sumber daya finansial untuk pelaku UMKM, yang di Indonesia merupakan usaha yang lebih dari 90% menyerap angkatan kerja.

---

<sup>6</sup> Coeure, Benoit. 2012. *What can monetary policy do about inequality?* Paper Presentation at the International Day for the Eradication of Poverty, Intergroup "Extreme poverty and human rights, Fourth World Committee" event, European Parliament, Brussels, 17 Oktober 2012.

Pentingnya penyaluran kredit oleh perbankan pada masyarakat untuk kegiatan usaha, baik usaha mikro, kecil atau menengah telah banyak diteliti. Menurut Taty Widayati (2003) dalam tujuannya dibuat lembaga keuangan atau perbankan baik lembaga keuangan konvensional, syariah, ataupun mikro bertujuan (1) membuka akses para pengusaha kecil agar dapat meningkatkan aktivitas pengusaha kecil dalam hal pembiayaan usaha, baik dalam bentuk modal kerja maupun investasi; (2) menumbuhkan dan memupuk jiwa kewirausahaan di lingkungan masyarakat menengah ke bawah sehingga dapat menjadi solusi pengentasan kemiskinan<sup>7</sup>.

Lebih lanjut (Nurul Widyaningrum, 2002) mengatakan lembaga keuangan mikro yang didirikan tidak hanya untuk memberikan jasa keuangan bagi masyarakat kecil, tetapi juga terjun dengan isu pemberdayaan. Kelompok ini terutama melihat bahwa pembukaan akses kepada jasa keuangan atau permodalan mikro merupakan titik masuk (entry point) untuk kegiatan pemberdayaan yang lain, seperti meningkatkan akses terhadap sumber modal, mengentaskan kemiskinan, memberdayakan perempuan sebagai salah satu penunjang kegiatan ekonomi keluarga, dan sebagainya<sup>8</sup>. Hasil penyaluran KUR yang tercatat dalam Komite Kredit Usaha Rakyat diseluruh Indonesia melalui 7 Bank nasional (BRI, BNI, Mandiri, BSM, Bukopin, BTN, dan BNI syariah) mencatatkan hasil penyaluran sebanyak 20 Triliun Rupiah dengan Plafon berkisar antara 10 hingga 50 juta rupiah mampu menghasilkan angka dan total

---

<sup>7</sup> Taty Widayati, 2003. *Peran Perbankan dalam Pengembangan Keuangan Mikro*. Bunga Rampai Lembaga Keuangan Mikro. (Jakarta : Business Innovation Center, 2003)

<sup>8</sup> Nurul Widyaningrum, 2002. *Model Pembiayaan BMT dan Dampaknya Bagi Pengusaha kecil*. (Bandung : Yayasan AKATIGA, 2002)

nasabah sebanyak 7.5 juta debitur<sup>9</sup>. Penyaluran tersebut diberikan kepada para pengusaha mikro, kecil dan menengah yang kebanyakan bergerak dibidang pertanian, perdagangan, dan hotel restoran. Penyaluran dana tanpa agunan sebanyak itu merupakan salah satu usaha yang dilakukan pemerintah dalam memanfaatkan sumberdaya finansial yang bersumber dari Bank yang tentunya berasal dari kegiatan menerima dan menyalurkan dana bagi masyarakat guna meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sebagaimana tujuan dan fungsi berdirinya perbankan.

Indeks Gini yang mengukur ketimpangan pendapatan masyarakat terus naik empat tahun belakangan ini (tahun 2008-2011 masing-masing 0,350, 0,370, 0,80, dan 0,410) membuat pemerintah Indonesia menganggap penting akan penyaluran kredit modal kerja untuk menurunkan kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan. Hal tersebut telah ditindak lanjuti dengan menerapkan *triple track strategy* oleh pemerintah di tahun 2011, yang meliputi *pro-growth*, *pro-job* dan *pro-poor*. Salah satu kebijakannya adalah memberdayakan masyarakat melalui PNPM mandiri untuk keluarga miskin dan KUR untuk usaha rakyat yang produktif. Berdasarkan Data Kementerian Perekonomian tahun 2012 salah satu daerah yang menerima kebermanfaatannya dari digalakkannya program KUR/KMK adalah provinsi Sumatera Barat.

Tercatat kurang lebih 15 ribu debitur atau pengusaha mikro dan kecil telah menerima bantuan KUR (Kredit Usaha Rakyat) tanpa agunan dengan kisaran dibawah 20 juta rupiah. Program tersebut secara aktif mencatat 61,33%

---

<sup>9</sup> Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Perekonomian tahun 2012

berjalan secara baik dengan sasaran para pedagang kecil seperti : penjual sayur-sayuran, pengusaha kedai makanan dan minuman, pengusaha ikan, serta pengusaha penjahitan di kabupaten Pesisir Selatan<sup>10</sup>.

Sepanjang perjalanannya, pola pemberian bantuan melalui saluran permodalan bagi usaha kecil dan mikro ternyata masih terbentur pada distribusi kredit yang terpusat dikota-kota besar saja, hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan kebijakan moneter masih berorientasi pada efektivitas pengembalian dana modal ketimbang menitikberatkan kepada manfaat penggunaan arus modal guna mendirikan usaha-usaha yang berbasis rakyat secara produktif. Hal ini terlihat dari data di bawah ini:

---

<sup>10</sup> Kredit Usaha Rakyat (KUR) Memudahkan Akses Permodalan Bagi Pedagang Kecil di Sumatera Barat, (<http://www.setkab.go.id/pro-rakyat-6713-kredit-usaha-rakyat-kur-memudahkan-akses-permodalan-bagi-pedagang-kecil.html>) (diakses tanggal 20 Maret 2013)

**Tabel I.2 Penyaluran Kredit UMKM Provinsi di Indonesia  
Tahun 2010-2012 (Dalam Juta Rupiah)**

No	Provinsi	Pinjaman yang diberikan		
		2010	2011	2012
1	Nanggroe Aceh Darussalam	117.612	18.629.798	21.281.179
2	Sumatera Utara	52.000	83.227.491	104.234.007
3	Sumatera Barat	476.397	516.009	30.449.550
4	Riau	35.850	33.606	51.475.647
5	Jambi	200.000	800.000	19.966.134
6	Sumatera Selatan	218.000	287.000	51.680.598
7	Bengkulu	500.000	1.391.464	8.607.798
8	Lampung	30.000	18.000	38.880.676
9	Bangka Belitung	241.000	74.000	7.491.575
10	Kepulauan Riau	193.091	200.325	26.903.767
11	DKI Jakarta	248.145.727	249.750.560	743.004.527
12	Jawa Barat	36.160.645	37.101.729	280.278.527
13	Jawa Tengah	1.250.670	1.413.413	149.202.365
14	DI Yogyakarta	684.880	800.033	17.058.887
15	Jawa Timur	775.947	920.352	222.511.227
16	Banten	14.440	14.845	114.920.153
17	Bali	1.594.770	10.278.105	27.711.512
18	Nusa Tenggara Barat	244.000	518.000	13.998.341
19	Nusa Tenggara Timur	3.195	3.119	10.941.160
20	Kalimantan Barat	287.923	224.304	27.587.778
21	Kalimantan Tengah	2.296.631	2.246.980	24.139.868
22	Kalimantan Selatan	135.000	113.000	28.980.667
23	Kalimantan Timur	647.993	471.222	64.270.592
24	Sulawesi Utara	150.000	932.150	18.918.546
25	Sulawesi Tengah	450.000	700.000	13.231.665
26	Sulawesi Selatan	153.576	164.721	57.702.150
27	Sulawesi Tenggara	190.000	765.000	8.646.687
28	Gorontalo	178.212	271.402	5.348.785
29	Sulawesi Barat	242.109	221.256	3.565.099
30	Maluku	35.024	32.958	5.841.953
31	Maluku Utara	40.000	45.000	2.349.004
32	Papua	8.121	7.598	11.633.092
33	Papua Barat	7.500	15.000	2.321.738
	<b>Total</b>	<b>292.628.043.</b>	<b>397.262.721</b>	<b>2.236.789.243</b>

Data menunjukkan perkembangan pemberian kredit UMKM di seluruh provinsi Indonesia begitu bervariasi antara satu provinsi dengan provinsi yang lain. Dapat kita ketahui bahwa saluran kredit lebih banyak mengalir ke pulau Jawa dengan total penyaluran mencapai 2.7 Triliun sedangkan daerah yang jauh dari pusat ibukota seperti Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua hanya menyentuh angka 1.5 Milyar saja kendati di Kalimantan penyalurannya termasuk besar. Hal di atas mengindikasikan adanya ketimpangan alokasi dalam pemberian dana bantuan melalui pemberian kredit tanpa agunan terjadi di Indonesia.

Faktor selain kebijakan moneter, kebijakan fiskal merupakan pilihan kebijakan di banyak negara untuk mengatasi ketimpangan distribusi pendapatan, Kebijakan redistribusi seperti subsidi dan transfer masih banyak diterapkan, termasuk di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang termasuk dalam negara yang melakukan pengeluaran pemerintah dalam jumlah besar melalui produk subsidi yang ada. Subsidi yang ada di Indonesia berasal dari anggaran pemerintah pusat dan daerah, Dimana subsidi tersebut terdiri dari dua jenis, yakni : subsidi energi dan non-energi yang disalurkan oleh pemerintah pusat, serta belanja subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Kebijakan terdistribusi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendorong perekonomian masyarakat dengan berbagai produk subsidi seperti subsidi BBM, subsidi listrik, subsidi pupuk, subsidi raskin, maupun bantuan operasional sekolah dan bantuan langsung tunai. Selain kebijakan moneter melalui PNPM mandiri dan KUR dalam *triple track strategy*, pemerintah

Indonesia juga memberikan subsidi berupa raskin dan dana BOS, juga subsidi lainnya seperti pengobatan gratis bagi masyarakat miskin.

Ketimpangan distribusi pendapatan yang tidak merata merupakan efek dari pembangunan ekonomi yang tidak merata, dan dapat dipengaruhi oleh ketimpangan distribusi di tahun sebelumnya, karena proses pembangunan ekonomi biasanya merupakan proses pembangunan yang berlanjut.

Secara umum faktor-faktor utama penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi antar provinsi di Indonesia diuraikan sebagai berikut :

1. Konsentrasi kegiatan ekonomi yang tinggi di daerah tertentu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan antar daerah. Ekonomi dari daerah dengan konsentrasi kegiatan ekonomi tinggi cenderung tumbuh pesat, sedangkan daerah dengan tingkat konsentrasi ekonomi rendah akan cenderung mempunyai tingkat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah.

Ada dua (2) masalah utama dalam pembangunan ekonomi nasional selama ini. Yaitu : terutama Jawa, dengan berbagai alasan ekonomis maupun politis atau strategis. Dua, yang dimaksud dengan efek menetes ke bawah tersebut tidak terjadi atau prosesnya lambat. Hal terakhir ini disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu :

- a. Sebagian besar input untuk berproduksi di impor dari luar, bukannya di *supply* dari daerah. Oleh karena itu, keterkaitan produksi ke belakang atau keterkaitan produksi antara industry hilir

(*downstream industry*) di Jawa dan industri hulu (*upstream industry*) di luar Jawa sangat lemah.

- b. Sektor-sektor primer didaerah-daerah luar Jawa melakukan ekspor tanpa memprosesnya terlebih dahulu untuk mendapatkan nilai mendapatkan nilai tambah atau kalau memprosesnya terlebih dahulu di pulau Jawa sehingga Jawa yang menikmati nilai tambahnya.
- c. Kegiatan ekspor yang bersumber dari daerah di luar Jawa (baik primer maupun dari industri hulu atau *midstream industry*) pada hasil ekspor lebih banyak dinikmati oleh Jawa.

Jadi, kurang berkembangnya sektor industri manufaktur di luar Jawa merupakan salah satu penyebab kesenjangan ekonomi antar Jawa dan wilayah di luar Jawa. Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan sebagian besar industri penting di Indonesia, dalam arti kontribusinya yang besar terhadap pembentukan atau pertumbuhan PDB dan kesempatan kerja, tidak berada di luar Jawa karena keterbatasan-keterbatasan di kawasan tersebut, seperti pasar lokal kecil, infrastruktur terbatas, dan kurang sumber daya manusia; walaupun banyak provinsi di wilayah tersebut, seperti Aceh, Riau, Kalimantan, dan Papua, memiliki sumber daya yang cukup.

Indikator lain yang juga menunjukkan pola serupa seperti pola distribusi nilai tambah (NT) Industri antar provinsi adalah distribusi investasi langsung, baik yang bersumber dari luar negeri (penanaman

modal asing-PMA) maupun dari dalam negeri (penanaman modal dalam negeri-PMDN). Berdasarkan teori pertumbuhan ekonomi dari Harrod-Domar yang menerangkan adanya korelasi positif antara tingkat investasi dan laju pertumbuhan ekonomi, dapat dikatakan bahwa kurangnya investasi di suatu wilayah membuat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan masyarakat per kapita di wilayah tersebut rendah karena tidak ada kegiatan-kegiatan ekonomi yang produktif, seperti industri manufaktur.

## 2. Tingkat Mobilitas Faktor Produksi yang Rendah antar Daerah

Kurang lancarnya mobilitas faktor produksi, seperti tenaga kerja dan capital, antar provinsi juga merupakan terjadinya ketimpangan ekonomi regional. Dasar teorinya adalah sebagai berikut. Perbedaan laju pertumbuhan ekonomi antar provinsi membuat terjadinya perbedaan tingkat pendapatan per kapita antar provinsi sejak perbedaan tersebut, dengan asumsi bahwa mekanisme pasar output dan input bebas (tanpa distorsi yang direkayasa, misalnya sebagai akibat dari suatu kebijakan pemerintah), mempengaruhi mobilitas atau re-alokasi faktor produksi antar provinsi. Sesuai teori dari A. Lewis yang dengan *unlimited supply of labor*, jika perpindahan faktor produksi antar daerah tidak ada hambatan, maka pada akhirnya pembangunan ekonomi yang optimal antar daerah akan tercapai dan semua daerah akan lebih baik (dalam pengertian Pareto optimal: semua daerah mengalami *better off*).

### 3. Perbedaan Sumber Daya Alam antar Provinsi

Dasar pemikiran “klasik” sering mengatakan bahwa pembangunan ekonomi di daerah yang kaya sumber daya alam akan lebih maju dan masyarakatnya lebih makmur dibandingkan di daerah yang miskin sumber daya alamnya. Dalam arti sumber daya harus dilihat hanya sebagai modal awal untuk pembangunan, yang selanjutnya harus dikembangkan terus. Oleh karenanya hal ini diperlukan faktor-faktor lain, diantaranya yang sangat penting adalah teknologi dan sumber daya manusia.

Dengan semakin pentingnya penguasaan teknologi dan peningkatan sumber daya manusia, faktor endowments lambat laun akan tidak relevan lagi. Bukti menunjukkan bahwa negara-negara maju di Asia Tenggara dan Timur, seperti, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan Singapura, adalah negara-negara yang sangat miskin sumber daya alam. Pengalaman mereka menunjukkan bahwa faktor-faktor di luar sumber daya alam jauh lebih penting dalam menentukan maju tidaknya pembangunan ekonomi di suatu wilayah.

### 4. Perbedaan Kondisi Demografis antar Wilayah

Ketimpangan ekonomi regional di Indonesia, disebabkan oleh perbedaan kondisi demografis antar provinsi, terutama dalam hal jumlah dan pertumbuhan penduduk, tingkat kepadatan penduduk, pendidikan, kesehatan, disiplin masyarakat, dan etos kerja. Faktor-faktor ini mempengaruhi tingkat pembangunan dan pertumbuhan

ekonomi lewat sisi permintaan dan sisi penawaran. Dari sisi permintaan, jumlah penduduk yang besar merupakan potensi besar bagi pertumbuhan pasar, yang berarti faktor pendorong bagi pertumbuhan kegiatan-kegiatan ekonomi. Dari sisi penawaran, jumlah populasi yang besar dengan pendidikan dan kesejahteraan yang baik, disiplin yang tinggi, dan etos kerja yang tinggi merupakan asset penting bagi produksi.

#### 5. Kurang Lancarnya Perdagangan antar Provinsi

Kurang lancarnya perdagangan antar daerah (intra-regional trade) juga merupakan unsur yang turut menciptakan ketimpangan ekonomi regional di Indonesia. Ketidaklancaran tersebut disebabkan terutama oleh keterbatasan transportasi dan komunikasi. Perdagangan antar provinsi meliputi barang jadi, barang modal, input perantara, bahan baku, material-material lainnya untuk produksi, dan jasa. Jadi, tidak lancarnya arus barang dan jasa antar daerah pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu provinsi lewat sisi permintaan dan sisi penawaran. Dari sisi permintaan, kelangkaan barang dan jasa untuk konsumen mempengaruhi permintaan pasar terhadap kegiatan-kegiatan ekonomi lokal yang sifatnya komplementer dengan barang dan jasa tersebut (misalnya antara pembelian motor yang diimpor dari provinsi lain dan permintaan terhadap topi pengaman (helm) yang diproduksi lokal) atau yang sifatnya pendukung (misalnya bengkel atau jasa reparasi motor). Sedangkan dari sisi penawaran, sulitnya mendapatkan barang modal, seperti mesin dan alat-alat transportasi, input perantara, dan bahan baku atau material lainnya,

dapat menyebabkan kegiatan ekonomi di suatu provinsi lumpuh atau tidak beroperasi secara optimal, yang selanjutnya berarti pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan per kapita provinsi tersebut rendah.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini ditujukan untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat, melalui kemampuan alokasi sumber daya financial khususnya kredit usaha mikro kecil menengah (UMKM), dan subsidi yang dikeluarkan pemerintah serta ketimpangan distribusi pendapatan periode sebelumnya.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh antara jumlah penduduk terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia?
2. Apakah ada pengaruh antara teknologi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia?
3. Apakah ada pengaruh antara alokasi sumber daya finansial terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia?
4. Apakah ada pengaruh antara tingkat suku bunga terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia?
5. Apakah ada pengaruh antara subsidi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia?

6. Apakah ada pengaruh antara investasi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia?

### **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah maka peneliti membatasi penelitiannya pada “Pengaruh antara alokasi sumber daya finansial dan subsidi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia”. Pembatasan dilakukan pada variabel sumber daya finansial merujuk pada alokasi penyaluran kredit UMKM yang disalurkan perbankan di Indonesia atas dasar alasan keberpihakan penyaluran kredit bagi UMKM yang terbukti mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang sangat banyak serta alasan agar dapat merangsang pertumbuhan serta distribusi pendapatan yang lebih merata. Pembatasan variabel subsidi merujuk kepada subsidi BBM yang disalurkan pemerintah ke seluruh provinsi di Indonesia.

### **D. Perumusan Masalah**

Dengan memperhatikan latar belakang yang telah diuraikan diatas dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh antara alokasi sumber daya finansial terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia?
2. Apakah ada pengaruh antara subsidi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia?

3. Apakah ada pengaruh antara alokasi sumber daya finansial dan subsidi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia?

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi semua pihak baik secara teoritis maupun praktis:

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat berguna untuk menambah referensi dan khasanah ilmu pengetahuan, khususnya tentang pengaruh antara alokasi sumber daya finansial dan subsidi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia sehingga penelitian ini dapat menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan bagi semua pihak.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan untuk bahan acuan, masukan, serta referensi bagi peneliti selanjutnya dan juga penelitian ini dapat digunakan sebagai instrumen evaluasi alokasi sumber daya finansial dan subsidi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia.